

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
(SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) PROVINSI RIAU**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : HERDIAN

NIM : 126232134

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
(SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) PROVINSI RIAU**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : HERDIAN

NIM : 126232134

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
(SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) PROVINSI RIAU

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Herdian

126232134

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Sriwati, S.E., M.Ak., Ak., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang merupakan aplikasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan dalam proses perencanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan oleh BPKAD Provinsi Riau mulai dari tahapan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah terutama terkait penggunaan anggaran yang telah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terdapat kelemahan yang masih dihadapi dalam penggunaan SIPD dan menyebabkan terkendalanya pengelolaan keuangan daerah terutama dalam tahapan penatausahaan dan pelaporan anggaran.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; hambatan

ABSTRACT

This research aims to provide an overview of the use of the Regional Government Information System (SIPD) in regional financial management carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), which is an application required by the central government for use in the planning, implementation and reporting process of financial management in local government. This research uses a qualitative descriptive method with data obtained from interviews. The results of this research show that SIPD has been used by BPKAD Riau Province starting from the planning, implementation and reporting stages of regional financial management, especially regarding the use of budgets that have been approved in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). There are weaknesses that are still faced in the use of SIPD and cause problems with regional financial management, especially in the budget implementation and reporting stages.

Keywords: *Regional Government Information System; Regional Financial and Asset Management Agency; obstacle*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik. Salawat beriringkan salam, penulis juga ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Sawidji Widodoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Akt., CPI, CA, CPA, selaku Ketua Program Studi Profesi Akuntan;
4. Sriwati, S.E. M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
5. Seluruh dosen di PPAk FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan;
6. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 10 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Herdian', with a horizontal stroke extending to the right.

Herdian

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1. Konsep Implementasi	4
2.2 Efektifitas.....	5
2.3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.....	6
2.4. Kerangka Konseptual.....	7
BAB III METODE PENELITIAN	8
3.1. Objek Penelitian.....	8
3.2. Metode Penelitian.....	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1 Hasil dan Pembahasan	10
4.1.1 Implementasi SIPD	10
4.1.2 Hambatan Implementasi SIPD	14
4.2.3 Akibat Adanya Hambatan	14
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	16
5.1. Simpulan	16
5.2. Saran	16
REFERENSI.....	17
DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN	18
LEMBAR IJIN PENELITIAN	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	7
Gambar 4. 1 Alur Penyusunan Rancangan KUA.....	7
Gambar 4. 2 Alur Penatausahaan Penerimaan.....	11
Gambar 4. 2 Alur Penatausahaan Pengeluaran.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa salah satu tantangan pencegahan korupsi terkait keuangan negara adalah belum terintegrasinya kebijakan, proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi belanja negara, sehingga diperlukan kebijakan, proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja birokrasi yang terintegrasi. Sejalan dengan ketentuan tersebut serta ditetapkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia maka diperlukan adanya sebuah layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik.

Dalam rangka mengakselerasi upaya pengintegrasian dan penyelarasan tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mendefinisikan SIPD sebagai pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penerapan SIPD ini menggantikan aplikasi terdahulu yang sudah digunakan oleh pemerintah daerah seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikelola oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang juga merupakan fasilitas dari Kemendagri.

Lingkup penggunaan SIPD yang diatur dalam Permendagri tersebut meliputi informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya. SIPD sebagaimana dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Hal ini menjadikan SIPD sebagai sesuatu yang wajib digunakan agar terciptanya integrasi dalam pengelolaan keuangan daerah teruta terkait dengan informasi keuangan daerah. Dengan begitu luasnya wilayah administratif Indonesia

yang terdiri dari 416 kabupaten, 98 kota dan 38 Provinsi menjadi tantangan dalam mewujudkan integrasi tersebut. Berbagai hambatan dapat saja dialami dalam penggunaan SIPD tersebut. Rhandu dkk (2022) menyatakan bahwa penerapan SIPD ini berbentuk website dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu menggambarkan permasalahan SIPD juga terjadi di BPKAD Kota Medan. Permasalahannya yakni adanya menu input SIPD yang perlu dilengkapi Jaringan SIPD sering mengalami error yang menyebabkan terhambatnya penyusunan anggaran kas, dan lainnya (Nasution & Nurwani, 2021). Menurut Wurara et al (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya kurang efisien karena kurangnya pemahaman pegawai dalam mengoperasikan SIPD. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ekaputra (2021), hasil penelitian dalam implementasi SIPD kurang efektif dari sisi kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan.

Untuk mendapatkan gambaran terkait penerapan SIPD, maka akan menggunakan model implementasi. Menurut George Edward III (1980) implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam pandangan Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi (*communications*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*dispositions*); dan struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*). Dalam rangka menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan dan terintegrasi secara menyeluruh, model implementasi kebijakan tersebut dapat menjadi acuan untuk menilai efektifitas penggunaan SIPD terutama untuk fitur informasi keuangan daerah.

Sinurat dan Panjaitan (2017), mengemukakan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang bernilai uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan hati-hati, yang melibatkan banyak langkah. Lebih lanjut Sinurat (2018), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara. Sementara itu Moenek dan Suwanda (2019), menjelaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantauan (evaluasi) penggunaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam

pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan APBD. Sedangkan menurut Khusaini (2018), pengelolaan keuangan daerah mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin memperoleh gambaran penggunaan SIPD terutama terkait dengan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami pemerintah daerah terutama pada BPKAD sebagai *leading sector* pelaporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan penggunaan SIPD dan pengembangannya guna menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang dapat terintegrasi secara menyeluruh dan memberikan transparansi yang lebih baik.

REFERENSI

- Amanah, N. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang*. Skripsi, Universitas Sultan Ajen Tirtayasa, 2018.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Rhandu, Inzani. (2022). *Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja*. Jurnal Inovasi Penelitian.
- Nasution & Nurwani M, 2021. *Analysis Of The Effectiveness And Efficiency Of The Internal Control System For The Supply Of Medicines In Public Hospitals Sinar Husni*.
- Ekaputra, N. D. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Otonomi, Vol. 21, (62-79)
- Sinurat, M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Pustaka Rahmat.
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia.
- Moenek, R. (2019). *Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Rosda.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Amanah, N. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang*. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.
- Nasution, M.I., & Nurwani. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Volume 9 (109-116)
- Richard M. Steers (1985:53). "*Efektivitas Organisasi*".
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 *tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi*.
- Perpres Nomor 95 Tahun 2018 *tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.
- Perpres Nomor 39 Tahun 2019 *tentang Satu Data Indonesia*.